PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Kamis Tanggal: 19 Desember 2013 Halaman: 2

Pelayanan Tak Tergantung Kurangnya Tenaga

Pelimpahan Kewenangan Harus Jalan

JOGJA - Program pelimpahan kewenangan berbasis wilayah yang sudah belangsung sekitar setahun diyakini mampu mendorong kemandirian dalam bidang pelayanan. Kendala terkait kekurangan tenaga tidak dapat dijadikan alasan sebagai pemicu berhentinya sistem yang sudah berjalan.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menyatakan, pelayanan tidak dapat dilihat dari kuantitas yang dibandingkan dengan keterbatasan tenaga. Pelayanan lebih terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kecamatan tetap harus komit menjalankan program pelimpahan wewenang di wilayah. Kurangnya tenaga kerja tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menjalankan sistem," terang Haryadi dalam kunjungannya di kantor Kecamatan Gondomanan, Jogja kemarin (18/12).

Pejabat yang akrab disapa HS itu menegaskan lebih memilih memperbaiki sistem dan meningkatkan SDM dalam menjalankan berbagai program pelimpahan wewenang di kecamatan. Menurutnya, meningkatkan kualitas SDM tidak hanya bisa dilakukan dengan menambah jumlah tenaga.

Peningkatan kualitas SDM di level wilayah dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan lanjutan kepada para lurah dan pegawai. Ini untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kompetensi mereka.

Program pelimpahan kewenangan ini, menurutnya, memiliki progres yang baik bagi masyarakat. Dia memberi contoh sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten). "Sistem ini di kecamatan sudah memberikan dampak positif. Warga tidak perlu mengurus pelayanan tertentu di pemkot lagi," jelasnya.

Dia menyebutkan, pelayanan Paten yang dilimpahkan di kecamatan meliputi pengurusan akta kelahiran, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, dan izin bagi pedagang kaki lima.

Belum lama ini, kata HS, kecamatan mendatangani standar pelayanan publik (SPP) untuk memberikan jaminan pelayanan. "Termasuk pembangunan fisik, juga dilimpahkan ke wilayah seperti rehabilitasi bangunan kelurahan," jelasnya.

Camat Gondomanan Agus Arif menilai kecamatan memiliki berbagai kewenangan untuk mendorong kemandirian di tingkat wilayah. Selain itu, kewenangan itu memudahkan masyarakat mengakses berbagai pelayanan baik pemberdayaan, pengurusan administrasi, dan pembangunan fisik.

"Tidak ada kendala soal pelimpahan kewenangan. Apa yang menjadi catatan wali kota soal kulitas SDM, kami akan evaluasi dan perbaiki," ucapnya.

Pelaksanaan program pelimpahan kewenangan di Kecamatan Gondomanan mampu memberikan hasil nyata.

Kecamatan itu semula mengelola dana Rp 381 juta untuk kegiatan pelimpahan wewenang. Kini jumlah dana menjadi tiga kali lipat yakni Rp 1,2 miliar. Pada 2014 ditargetkan dana bertambah menjadi Rp 1,7 miliar. **(hrp/amd/gp)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Organisasi 3. Kecamatan/Kemantren Gondomanan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005